Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perusahaan Leasing Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Di Kota Makassar

Sarifa Nabila^{1,2}, Said Sampara & Ilham Abbas¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: nabilaalmahdali@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Serta menganalisis faktor-faktor efektivitas yang mempengaruhi penegakan hukum bagi perlindungan konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen terhadap perusahaan Leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yakni bentuk preventif dan represif. Penegakan hukum sengketa konsumen tidak lepas dari tiga faktor yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukumnya yang mempengaruhi keberhasilan prosesnya. Adapun diantaranya ialah ketentuan yang kontradiktif dan rumusannya tidak jelas serta tegas, terlalu banyak peranan lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, tidak adanya pedoman operasional, dan pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK dengan sukarela.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Perusahaan Leasing

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the form of legal protection for consumers against companies leasing that commit acts against the law. As well as analyzing the factors that influence law enforcement for consumer protection against companies leasing that commit acts against the law. The results obtained by the author in conducting this research are consumer protection against companies leasing that commit acts against the law is divided into two, namely preventive and repressive forms. Law enforcement of consumer disputes cannot be separated from three factors, namely Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture which affect the success of the process. Among them are contradictory provisions and the formulation is not clear and firm, there are too many roles of institutions involved in UUPK law enforcement, there are no operational guidelines, and business actors do not voluntarily implement BPSK decisions.

Keywords: Legal protection; Consumer; Leasing Companies

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Sartono, 2010). Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam kredit (Yunus, 2017). Agar transaksi pinjam meminjam ini dapat berlangsung dengan baik, maka dalam praktek dikenal adanya jaminan/agunan dari pihak berhutang kepada pihak yang berpiutang. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar hutang tersebut akan dibayar sesuai dengan perjanjian dan jika yang berhutang ingkar janji maka benda yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh pihak yang berpiutang untuk menggantikan hutang yang tidak dibayar tersebut (Roeroe, 2017).

Perjanjian yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat adalah merupakan sumber terpenting yang melahirkan persetujuan maupun perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht* (Sinaga, 2018). Hukum perjanjian ini telah diatur pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 dikemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu (Asnawi, 2018).

Di dalam melaksanakan suatu perjanjian atau perikatan, para pihak harus mengkaji isi dari perjanjian yang disepakati, karena para pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut terikat dengan isi perjanjian (Yulianti, 2008). Artinya para pihak harus melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati karena semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terutama pada *Lessor* atau sebagai pelaku usaha dalam perusahaan *leasing* yang mengabaikan hak *Lessee* sebagai konsumennya dengan melakukan atau menerapkan sanksi sanksi di luar perjanjian yang telah disepakati seperti menyita dan menjual kendaraan milik *Lessee* secara sepihak (Fauzi, 2017). Hal ini terjadi karena para pihak di dalam perjanjian tersebut terutama dari pihak *Lessee* sebagai konsumen dinilai kurang mengerti akan hak dan kewajibannya, di sisi lain *Lessor* sebagai pelaku usaha juga dinilai tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian maupun klausula yang dibuatnya.

Dalam implementasinya terkadang sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha pembiayaan (Abbas, Salle & Djanggih, 2019) atau perusahaan *Leasing* yang dinilai kerap sangat merugikan para pengguna jasa atau nasabah perusahaan pembiayaan atau leasing tersebut. Salah satu perbuatan yang kerap dilakukan yakni penarikan kendaraan oleh Lembaga Pembiayaan secara sepihak. Dalam perjanjian tersebut penarikan mobil konsumen adanya peran jasa pihak ke tiga (*debt collector*) (Yani, 2020). Debt Collector disebut sebagai pihak ketiga

yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak lembaga pembiayaan (Khariati, 2020).

Biasanya *debt collector* melakukan penarikan dengan cara meneror atau memaksa disertai intimidasi untuk segera melunasi hutang dengan ancaman jika konsumen tidak melunasi hutang maka objek jaminan kredit itu diambil secara paksa. Seringkali juga *debt collector* melakukan tindakan mencegat konsumen di tengah jalan di saat konsumen sedang mengendarai kendaraan bermotor bisa dikatakan sangat membahayakan konsumen dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Hal ini jika merujuk kepada Pasal 1365 KUHperdata dapat dideskripsikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, karena kesalahan atau kelalaiannya itu telah menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi orang lain (Suhardini & Sukarmi, 2018). Tindakan seperti ini melanggar beberapa aturan hukum seperti Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, yang menyebutkan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian (Sushanty, 2020). Faktanya lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak di daftarkan.

Perlindungan hukum bagi konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha (Quintarti, 2020). Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, maka konsumen yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang terpenting dan mendesak untuk segera dicari solusinya.

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Purba, 1992), yakni Pasal 2 bahwa "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen, Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat memberikan harapan bagi *Lessee* sebagai konsumen terhadap *Lessor* sebagai pelaku usaha atau perusahaan *leasing* yang melakukan perbuatan melawan hukum (Bachri & Kurniawan, 2020). Sesuai Pasal 45 UUPK, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan pengadilan umum. Salah satu langkah

UUPK untuk menegakkan perlindungan konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), salah satunya adalah BPSK Kota Makassar.

Apabila pihak *Lessee* sebagai konsumen yang dirugikan ingin menyelesaikan perkaranya dapat mengadukan langsung ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adanya lembaga tersebut hadir sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen utamanya dalam hal adanya tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh Lembaga Pembiayaan

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris karena mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris (Arikunto, 2002) merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Lembaga perlindungan konsumen yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selaku lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha. Pemilihan obyek penelitian didasarkan pertimbangan bahwa kelancaran penelitian berkenaan dengan telah dilakukannya pra penelitian, di mana di Kota Makassar sudah banyak perusahaan pembiayaan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen, sehingga perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh pihak perusahaan leasing. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan yakni Agustus sampai September 2020.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perusahaan *Leasing* Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh *Leasing*

Lembaga Pembiayaan di Kota Makassar seperti diantaranya Mandiri Utama Finance, Smart Multi Finance, Mandala Multi Finance merupakan lembaga pembiayaan dalam pembelian kredit kendaraan yang memberi kemudahan kepada konsumen dalam kepemilikan kendaraan. Akan tetapi seringkali ada beberapa oknum perusahaan *leasing* yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti penarikan kendaraan bermotor secara sepihak.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUPK untuk menegakkan perlindungan konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh data penanganan yang pernah ditangani oleh BPSK, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Pada data yang penulis dapatkan dilapangan dapat diketahui bahwa jumlah kasus sengketa konsumen yang masuk pada lembaga BPSK tahun 2019 sebanyak 30 Kasus dengan penyelesaian kasus sebanyak 17 kasus dan 13 kasus diantaranya berlanjut ke

Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan kasus di dominasi antara konsumen dan perusahaan *Leasing* yakni sebanyak 19 kasus (sesuai dengan tabel) .

Perusahaan pembiayaan (Finance) menyumbang lebih dari 50% sebagai pihak yang terlibat sengketa. Kebanyakan kasus terjadi di dasarkan pada pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan kredit (*leasing*) dengan menggunakan jasa pihak ke tiga (*debt collector*). Selatan, salah satu kasus yang ditangani oleh BPSK yakni konsumen dengan perusahaan Mandiri Utama Finance yang melakukan penarikan dengan paksa dengan dilakukan oleh pihak ketiga yakni pihak ACC Keuangan sebagai penagih utang kreditor tanpa menunjukkan surat atau sertifikat fidusia.

Pengambilan paksa kendaraan bermotor dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kredit (*leasing*) dengan menggunakan jasa pihak ke tiga (*debt collector*) menurut penulis merupakan perbuatan yang melawan hukum. Pihak *leasing* tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak *leasing* tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal tersebut bertentangan dengan UU 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 15 ayat (2) menyebutkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, perbuatan *leasing* tersebut juga melanggar ketentuan Ketentuan Peaturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Menyatakan bahwa ketentuan pasal 3 bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Abdul Muis selaku Mediator pada Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa banyak kasus dimana lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan seringkali mencamtumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Padahal sebenarnya tidak dibuat dalam akta notaris. Seperti kasus yang terjadi di Kota Makassar Sulawesi.

Namun mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan hanya pasrah jika pelaku usaha atau *debt collector* mengambil kendaraannya secara paksa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Faisal Dg. Sigollo mengungkapkan bahwa.

“Selaku konsumen tidak pernah diberikan edukasi atau pemberitahuan oleh pihak *leasing* mengenai aturannya, yang saya tahu jika terlambat membayar maka kendaraan/unit dapat dilakukan penarikan langsung”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tindakan *leasing* melalui *debt collector* yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan. Dalam hukum pidana, tindakan perampasan ini diatur Pasal 368 ayat

(1) KHUP yang memuat aturan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen yang belum jatuh tempo.

2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Oleh Konsumen atas tindakan melawan hukum Perusahaan *Leasing*

Pada dasarnya sesuai dengan pasal 45 UUPK konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan. Gugatan tersebut dapat di tempuh melalui dua jalur yaitu:

a. Melalui Jalur Non Litigasi/Luar Pengadilan

Mengadukan atau melaporkan perihal gangguan atas kepentingan konsumen melalui instansi Pemerintah yang terkait, yang berdasarkan instrument hukum publik mempunyai kewenangan administratif terhadap perusahaan-perusahaan dalam lingkup wewenangnya, atau instansi yang berwenang mengusut perilaku yang memuat unsur-unsur melawan hukum.

Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa dengan cara non pengadilan atau di luar pengadilan, bisa melakukan alternatif resolusi masalah ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adapun penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), diatur dalam pasal 49 UUPK dan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.301/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001. Ketentuan tersebut terakhir diubah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 06/m-dag/per/2/2017 tentang badan penyelesaian sengketa konsumen yang dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah provinsi.

Lembaga penyelesaian di luar pengadilan yang dilaksanakan oleh BPSK ini memang dikhususkan bagi pelaku usaha dan konsumen yang meliputi jumlah nilai yang kecil tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai kecil sampai besar.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Makassar berada di jalan Rappocini nomor 219, dalam menangani aduan yang masuk, BPSK memiliki alur proses laporan yang telah di publikasikan di bagian depan kantor seperti yang penulis dokumentasikan di atas, dengan penjelasan mengenai alur Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam penanganannya, yang menjadi dasar dalam tindakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengacu kepada Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999. Apabila hak tersebut di atas dilanggar, konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku

usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 ayat (3) UUPK disebutkan bahwa putusan Majelis dari BPSK bersifat mengikat, dan wajib mengeluarkan putusan tersebut paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan diterima, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak menerima putusan BPSK tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55. Apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan BPSK menyerahkan putusan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut UU No.8 Tahun 1999 Pasal 52 huruf a, BPSK selaku badan atau lembaga saat ini bertugas dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi mempunyai beberapa cara penyelesaian atau sering disebut dengan metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non-litigasi yang antara lain meliputi mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Metode mediasi yaitu penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini pada dasarnya sama dengan cara konsiliasi, hanya yang membedakan dari kedua cara dimaksud bahwa majelis aktif dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa, namun demikian hasil keputusan seluruhnya diserahkan kepada para pihak.

Metode arbitrase yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini, pelaksanaannya berbeda dengan cara mediasi dan konsilias. Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, cara persuasif tetap dilakukan dengan memberi penjelasan kepada para pihak yang bersengketa perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen. Keputusan atau kesepakatan dalam penyelesaian sengketa sepenuhnya menjadi wewenang majelis.

Metode konsiliasi yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dimana dalam hal ini majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, jika melalui cara ini majelis hanya bertindak sebagai konsiliator (pasif). Hasil penyelesaian sengketa konsumen tetap berada ditangan para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ibu Hj. Sri Rezki dengan wawancara yang sebagai berikut:

1. bahwa dalam proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK berupa persidangan. Dimana persidangan tersebut terdiri dari beberapa unsur yang menjadi majelis dalam persidangan diantaranya Pihak Pemerintah, dalam hal ini pegawai negeri dalam lingkup BPSK, Pihak Konsumen, dalam hal ini diwakili oleh Lembaga perlindungan konsumen swadaya Masyarakat atau LPKSM, pihak pelaku usaha, yang diutus dari pihak yang di adukan oleh konsumen. Menurut narasumber, untuk dapat masuk dalam majelis harus ada LPKSM terlebih dahulu, tidak dapat memasuki majelis jika tidak terdapat pendampingan oleh LPKSM.
2. Putusan dari persidangan di BPSK bersifat mengikat, diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan keberatannya terhadap putusan dari BPSK dimungkinkan untuk membawanya kepada Pengadilan Negeri dan putusan dari BPSK biasanya dipatuhi oleh kedua pihak,

3. Masalah Yang banyak masuk di BPSK adalah masalah pembiayaan, termasuk sengketa Perdata yang sebenarnya ditangani di pengadilan negeri. Tetapi kita BPSK tetap terima saja kalau konsumen mau diselesaikan sengketanya disini. Pengaduan kepada BPSK pun harus konsumen, dengan konsumen yang banyak adalah kasus pembiayaan yang menunggak dalam pembayaran kreditnya sehingga meminta keringanan atau kendaraannya yang ditarik sehingga upaya yang dilakukan adalah dipertemukan kepada pihak perusahaan sebelum kemudian disidangkan, apabila tidak terjadi perdamaian.
4. BPSK memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan konsiliasi secara mandiri dulu sebelum akhirnya masuk kepada persidangan BPSK. Dalam persidangan BPSK kemudian para pihak diupayakan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu, dalam proses mediasi pun dilakukan langsung untuk konsumen dan perusahaan saling jawab secara langsung. apabila tidak terjadi kesepakatan kemudian dilanjutkan kepada tahap arbitrase.
5. Surat pengaduan yang melatar belakangi terjadinya persidangan di BPSK yang berisikan aduan konsumen, jadi bukan seperti persidangan lainnya yang didahului dengan surat gugatan. Kalau surat pengaduan kurang dipahami konsumen, bagian kesekretariatan membantu mengisikan atau juga surat pengaduan itu dibawah pulang dulu ke rumah konsumen. Persidangan di BPSK juga dimungkin untuk adanya kuasa hukum, baik dari konsumen ataupun juga dari pelaku usaha dengan terlebih dahulu membuat surat kuasa.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan wewenang BPSK yang secara yuridis diatur dalam UUPK maupun dalam Keputusan Menteri Perdagangan tampak bahwa BPSK bahwa dalam konteks perlindungan konsumen dirancang tidak hanya sebagai badan yang menjalankan fungsi pengadilan (*court/tribunal*) tetapi sekaligus juga sebagai badan yang menjalankan fungsi konselor, advokasi, penyelidikan dan pengawasan. Dengan fungsinya sebagai “quasi pengadilan plus” tersebut maka peran perlindungan konsumen yang diemban BPSK tidak hanya bersifat represif yang berupa penyelesaian sengketa konsumen (dalam arti sempit = *court*) tetapi juga bersifat preventif yang berupa berbagai tindakan untuk mencegah terjadinya sengketa konsumen (dalam arti luas = advokasi konsumen).

b. Melalui Jalur Litigasi/Pengadilan

Litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah salah satu opsi yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa dalam mencari keadilan atau juga mendapatkan hak dan kewajiban yang semestinya mereka dapatkan. Badan peradilan merupakan salah satu bentuk dari perlindungan yang dilakukan negara terhadap masyarakatnya apabila terdapat kerugian atau pelanggaran hukum yang terjadi. Untuk itu negara menyerahkan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya dalam upaya penegakan hukum.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan lebih memakan waktu dikarenakan dalam prosesnya para pihak yang bersengketa masing-masing akan diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian baik itu pembuktian telah terjadinya suatu pelanggaran hukum atau pembuktian sebaliknya, dalam peradilan ini para pihak akan berhadapan satu sama lain, saling beradu bukti, saksi, dan argumen demi mendapatkan atau mempertahankan hak dan kewajiban mereka masing-

masing, karena pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Jenis-jenis peradilan dalam penyelesaian sengketa memiliki beberapa pembagian yaitu peradilan yang pada umumnya menangani masalah terkait perkara perdata ataupun pidana, yang kemudian dibagi kembali menjadi beberapa bagian sesuai dengan tingkatannya masing-masing mulai dari tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi. Selain badan peradilan yang menangani dan memutus perkara pidana maupun perdata juga ada badan peradilan yang khusus menangani perkara-perkara tertentu misalnya, Peradilan Anak, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan HAM, Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

Kekurangan yang terdapat pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah selain memakan waktu yang relatif lama, para pihak juga diharuskan mengeluarkan uang yang banyak selama proses peradilan berlangsung, serta kurang terjaminnya kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Oleh karena penyelesaian sengketa melalui litigasi ini lebih memakan waktu yang relatif lebih lama maka dibuat alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan yang dapat menutupi kekurangan pada penyelesaian sengketa melalui peradilan pada umumnya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perusahaan *Leasing* Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Penegakan hukum sengketa konsumen tidak lepas dari 3 (tiga) hal yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukumnya yang mempengaruhi keberhasilan prosesnya. Hal ini sesuai dengan teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang mengkaitkan antara ketiga hal tersebut dengan keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Antara Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukumnya akan selalu berhubungan dan saling mendukung, karena dengan substansi yang baik dan lengkap serta telah memenuhi kepastian hukum bagi masyarakat, hal itu tidak akan ada artinya ketika struktur atau penegak hukum yang berwenang tidak memiliki komitmen untuk melakukan tugasnya dengan baik untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum tersebut, maka pelaksanaan penegakan hukum juga akan terganggu dan sebaliknya dengan substansi yang cukup baik serta penegak hukum yang telah melakukan tugasnya sesuai peraturan hukum yang ada, itupun juga belum dapat disebut sebagai berhasilnya suatu penegakan hukum. Hal ini dikarenakan yang menjadi tujuan utama dari suatu penegakan hukum adalah adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat. Undang-undang mengatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun produsen, tetapi sulit mengaplikasikannya.

Salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen ialah BPSK, akan tetapi dalam pelaksanaannya memiliki Kelemahan diantaranya sebagai berikut:

1) Substansi Hukum

Pada peraturan perundang-undangan yang dapat disebut sebagai sumber utama penyebab hambatan operasionalisasi BPSK. Secara tidak langsung pembahasan berbagai hambatan yang dihadapi BPSK ini kesemuanya mengacu atau setidaknya menyinggung berbagai ketentuan dalam UUPK beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekretariat BPSK, Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ibu Hj. Sri Rezki, kelemahan UUPK (Undang – Undang No. 8 Tahun 1999) beserta peraturan pelaksanaannya yang mempengaruhi kinerja BPSK, antara lain:

1. Ketentuan yang kontradiktif (tidak konsisten), contohnya Pasal 54 ayat (3) UUPK yang mengatur bahwa putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Artinya tidak dimungkinkan adanya upaya hukum apapun terhadap putusan BPSK. Namun dalam pasal 56 ayat (2) UUPK diatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri. Artinya keputusan BPSK tidak bersifat final. Bahkan dalam pasal 58 ayat (2) UUPK semakin dipertegas lagi ketidak finalan putusan BPSK karena terhadap putusan Pengadilan Negeri atas keberatan terhadap putusan BPSK, para pihak masih dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Banyak ketentuan yang tidak jelas, seperti misalnya : apa yang dimaksud dengan “keberatan” yang dapat diajukan ke pengadilan Negeri, bagaimana pengadilan harus memeriksa dan mengadili keberatan tersebut, penetapan eksekusi atas putusan BPSK bersifat wajib atau fakultatif, mengapa putusan BPSK hanya bisa menjadi bukti awal dalam penyidikan, bagaimana jika cara penyelesaian tidak disepakati oleh para pihak, apa akibat hukumnya jika penyelesaian sengketa melampaui batas waktu yang ditentukan oleh UUPK, dan masih banyak lagi ketentuan yang secara teknis membingungkan operasionalisasi BPSK.
- 3) Beberapa ketentuan dalam UUPK melibatkan peran lembaga peradilan di luar BPSK, misalnya Penyidik, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, tetapi tidak dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan mengenai bagaimana BPSK, Penyidik, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjalankan perannya secara sistemik dan terpadu.
- 4) Belum adanya pedoman operasional yang lengkap dan jelas, yang membuat pelaksana BPSK menafsirkan UUPK dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan pemahamannya dan keterbatasannya. Dilapangan BPSK seringkali justru menemukan pemecahannya setelah melakukan kesalahan dalam penyelesaian kasus.
- 5) Pelaku usaha tidak mematuhi putusan BPSK. Putusan BPSK yang sudah tidak mungkin lagi diajukan antara lain :
 - a) Upaya hukum keberatan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
 - b) Ternyata pelaku usaha tidak menjalankannya secara sukarela meskipun putusan dimaksud (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) telah dimintakan penetapan fiat eksekusinya kepada pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan, maka menurut Pasal 56 ayat (4) Undang – Undang Perlindungan Konsumen, BPSK menyerahkan putusan

BPSK kepada penyidik untuk dilakukan penyidik sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Kelemahan lainnya ada dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-undang Perlindungan Konsumen yang tidak secara tegas mewajibkan pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) untuk membebaskan hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara anggsuran, namun hanya menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara anggsuran. Padahal seringkali pelaku Kondisi lain yang terjadi di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi tidak dibuat dalam akta notaris.

Jika merujuk pada teori efektivitas dalam penegakan hukum maka perlindungan konsumen dipengaruhi oleh faktor faktor sebagai berikut :

- a) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Kaitannya dalam BPSK terjadinya relevansi aturan secara umum dengan pelibatan unsur-unsur yang berperkara sehingga yang menjadi target itu relevan.
- b) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Peraturan berupa UUPK secara rumusan aturan ukum dapat dipahami meskipun didalamnya terdapat tumpang tindih norma sehingga menurut penulis diperlukan beberapa perbaikan.
- c) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Dalam kaitannya BPSK fungsi sosialisasi ini optimal dengan adanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPSKM) dalam mendampingi konsumen selama persidangan dengan disyaratkan wajibnya pendampingan, meskipun perlunya sosialisasi ini ditingkatkan lagi agar permasalahan konsumen dengan perusahaan *leasing* dapat berkurang.
- d) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- e) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Majelis dalam persidangan BPSK dalam pengambilan keputusannya melibatkan unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha sehingga sanksi dalam putusan dapat proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- f) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati. Pada BPSK setidaknya terdapat pengaduan yang memungkinkan diprosesnya tindakan yang diduga merupakan pelanggaran agar dapat diberikan sanksi atau solusi kepada perusahaan sebagai upaya perlindungan konsumen
- g) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut. Dalam hal BPSK yang menjadi penegak hukum yaitu majelis persidangan yang dimana tedapat unsur dari pemerintah, konsumen,

serta pelaku usaha sehingga dapat optimal karena melibatkan setiap unsur dalam proses lahirnya putusan.

- h) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

2) Struktur Hukum

Kelemahan dari pelaksanaan oleh petugas pelaksana atau disebut juga sebagai struktur hukumnya melengkapi ketidak efektifan perlindungan konsumen yang membuat penegakan hukumnya secara struktur menjadi tidak efektif, karena BPSK sebagai aparat yang berwenang kesulitan dalam melakukan penindakan secara nyata terhadap pelaku usaha yang melanggar khususnya dalam pelanggaran penarikan paksa yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Sri Rezeki selaku kepala Sekretariat BPSK mengatakan bahwa Intinya aturan mengenai perlindungan konsumen sudah memiliki regulasi yang mengatur dengan baik mengenai sasaran yang dilindungi dan penegak hukum yang seharusnya melindungi. Namun kelemahannya seperti yang telah dijabarkan diatas, dengan wewenang yang cukup lengkap BPSK tidak memiliki pedoman pendukung untuk melaksanakan tugasnya tersebut, sehingga hal ini menjadi kendala seperti misalnya tidak dapat secara seketika memberikan perlindungan atau mengembalikan unit kepada konsumen.

Menurut penulis, seharusnya ketika sengketa ditangani oleh BPSK maka objek sengketa yakni unit kendaraan yang telah dilakukan oleh *Leasing* harus disita oleh BPSK untuk menjamin pihak *leasing* tidak melakukan lelang terhadap unit. Faktanya, seperti yang terjadi pada sengketa antara Andi Rasmiati dengan Mandala Utama Finance ketika telah ditangani oleh BPSK objek jaminan sudah dilelang oleh pihak perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konsumen mengatakan bahwa dirinya hanya diberitahukan melalui SMS/WA yang mengaku dari pihak *leasing* ingin melakukan penarikan. Bahkan pihak *leasing* pada saat itu datang melakukan penarikan tanpa melibatkan atau seizin saya selaku nasabah. Setelah dilakukan penarikan kemudian pihak *leasing* melakukan lelang dan memberitahukan via WA bahwa kendaraan tersebut telah di lelang. Sedangkan menurut Albert Sidonggala selaku HR Officer Mandiri Utama Finance bahwa pihaknya hanya menjalankan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan telah disetujui oleh konsumen/nasabah jadi tidak ada alasan untuk menolak, walaupun keberatakan silahkan ajukan upaya hukum.

Selain masalah BPSK tidak dapat mengakomodir perlindungan hukum dalam hal terjadi penarikan secara paksa, seingkali juga penulis menemukan perbedaan pandangan antara Majelis BPSK dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Hal ini dapat kita lihat dari 30 kasus yang ditangani oleh BPSK, 19 diantaranya berlanjut di Pengadilan Negeri. Penulis menemukan adanya kasus yang sudah ditangani oleh BPSK yang membatalkan eksekusi perusahaan *leasing* namun ketika perusahaan *leasing* mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri justru dimenangkan oleh Majelis Hakim. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan dalam perlindungan hukum konsumen, bahwa BPSK ada tetapi tidak

memiliki kekuatan yang efektif atau daya mengikat sehingga dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri atau bahkan perusahaan tidak mematuhi putusan BPSK itu sendiri.

3) Kultur Hukum

Leasing diikat berdasarkan perjanjian baku atau kontrak standar perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir yang dibuat oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditanda tangani, umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi, mengubah klausula yang dibuat oleh salah satu pihak, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah. Demikian pula mengenai syarat-syarat baku dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa perlu merundingkan terlebih dahulu isinya. Maka perjanjian baku hakikatnya merupakan perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Klausula perjanjian baku sebelumnya telah ditetapkan secara sepihak, yaitu pihak yang umumnya dapat dikatakan sebagai pihak yang menentukan, karena mempunyai *bargaining position* yang jauh diatas pihak lainnya, baik dalam kedudukan ekonomis, pengetahuan dan pengalaman berkenaan yang menyangkut objek dari perjanjian tersebut, sedangkan pihak lainnya yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak diajak merundingkan persyaratan dari perjanjian tersebut.

Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya yang dapat mengatasi kendala-kendala tersebut diatas sebagai jalan keluar dari semua permasalahan yang ada baik terkait masalah substansi, struktur maupun kultur masyarakatnya. Substansi yang lengkap, struktur yang berintegritas akan dapat memaksimalkan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen, dengan didukung oleh kesadaran dan kemauan dari masyarakat untuk ikut juga melindungi dirinya sendiri sebagai konsumen.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum sengketa yang dilakukan oleh BPSK di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. BPSK terus menggalakkan program sosialisasi tugas dan fungsi BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen kepada masyarakat;
2. BPSK membuka ruang dialog dengan masyarakat melalui radio maupun secara langsung, dengan tujuan untuk mengajak masyarakat menjadi konsumen cerdas dan mampu melindungi diri dari kenakalan konsumen;
3. BPSK Kota Makassar dengan anggaran terbatas tetap melakukan tugasnya dengan baik, tetap menerima pengaduan dari konsumenatas sengketa konsumen dengan pihak pelaku usaha;
4. BPSK Kota Makassar menggandeng media massa untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa mereka dapat menuntut haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.
5. BPSK meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Pada dasarnya BPSK sendiri tidak dapat berbuat banyak selain tetap melakukan tugasnya dengan baik, karena terbatas dengan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Terkait permasalahan yang berkaitan dengan regulasi perlindungan konsumen, diharapkan kedepan ada perbaikan dalam pembuatan aturannya.

Penegakan hukum sengketa konsumen yang terjadi saat ini masih lebih dominan dilakukan ketika ada laporan dari pihak konsumen. BPSK tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen, namun juga bertugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sebagai mana telah disebutkan diatas. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh BPSK untuk menekan tingkat sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha di Kota Makassar khususnya.

Selain itu langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen melalui pembinaan juga merupakan langkah preventif dalam upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Rendahnya tingkat kesadaran dan minimnya pengetahuan konsumen akan hak dan kewajibannya menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharap adanya kesadaran dari pelaku usaha yang pada dasarnya secara prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan model seminimal mungkin. Prinsip seperti ini sangat merugikan kepentingan konsumen belum lagi posisi tawar konsumen tidak berada pada kedudukan yang setara dengan pelaku usaha atau memiliki posisi yang lemah khususnya perusahaan *leasing*

KESIMPULAN

1. Perlindungan Konsumen terhadap perusahaan *Leasing* yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa penarikan secara sepihak dengan menggunakan pihak ketiga terhadap kendaraan milih debitur terbagi menjadi dua yakni bentuk preventif dan represif. Bentuk preventif keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam UUPK. Sedangkan Bentuk represif ialah upaya pemberian sanksi melalui alternatif penyelesaian sengketa konsumen termasuk penanganan secara pidana akibat penarikan secara sepihak oleh perusahaan yang dikategorikan sebagai perampasana dalam hukum Pidana.
2. Penegakan hukum sengketa konsumen tidak lepas dari 3 (tiga) hal yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukumnya yang mempengaruhi keberhasilan prosesnya. Adapun diantaranya ialah ketentuan yang kontradiktif dan rumusannya tidak jelas serta tidak tegas, terlalu banyak peranan lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, tidak adanya pedoman operasioanl, dan pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK dengan sukarela. Oleh sebab itu, untuk mencapai efektifitas penegakan hukum maka perlu membuat relevansi aturan hukum secara umum, Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, Sosialisasi yang

optimal kepada seluruh target aturan hukum itu, Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

SARAN

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberikan aturan yang menguatkan sehingga putusan atau rekomendasi yang keluar dari badan ini dapat ditaati oleh konsumen juga dengan pihak *leasing*.
2. Perlindungan konsumen dengan bentuk Preventif seharusnya dapat ditingkatkan dengan sosialisasi yang masif oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa. Sedangkan perlindungan konsumen dengan bentuk represif dengan jalur non litigasi agar diberikan daya paksa agar putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dapat dipatuhi oleh pelaku usaha
3. Agar penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat efektif Faktor faktor berikut yang penulis sarankan, diantaranya:
 - a. perubahan substansi hukum dalam hal ini Undang Undang Perlindungan Konsumen yang memiliki banyak kelemahan untuk dilakukan revisi undang undang.
 - b. perubahan struktur dari lembaga perlindungan konsumen seperti penambahan kewenangan struktur BPSK untuk dapat melakukan panggilan disertai dengan sanksi yang tegas.
 - c. perubahan dari budaya masyarakat yang perlu untuk diberikan sosialisasi sehingga terbentuk budaya masyarakat yang sadar dan patuh kepada hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Salle, S., & Djanggih, H. (2019). Corporate Responsibility Towards Employees Welfare. *Yuridika*, 34(1), 37-53.
- Asnawi, M. N. (2018). Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 55-68.
- Bachri, R., & Kurniawan, Y. P. (2020). Disparitas Pemahaman Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kajian Putusan No. 350 K/Pdt. Sus-BPSK/2016 dan NO. 10/Pdt. Sus-BPSK/2016/PN. Plk). *Khairun Law Journal*, 1(2), 100-108.
- Fauzi, A. (2017). Benda Bergerak Sebagai Jaminan Hutang Dalam Praktek Leasing. *Jurnal Notarius*, 3(2), 15-28.
- Khariati, N. D. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector. *Perspektif Hukum*, 20(2), 180-202.
- Purba, A. Z. U. (1992). Perlindungan Konsumen: Sendi-Sendi Pokok Pengaturan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 22(4), 393-408.

- Quintarti, M. A. L. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 859-864.
- Roeroe, S. D. (2017). Kewenangan Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian Kredit. *Lex Privatum*, 5(1), 5-14.
- Sartono, A. T. (2010). Revitalitasasi Kaidah Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(3), 245-252.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.
- Suhardini, A. P., & Sukarmi, S. (2018). Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Akta*, 5(1), 261-266.
- Sushanty, V. R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 59-75.
- Yani, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. *UNES Law Review*, 2(3), 299-320.
- Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 2(1), 91-107.
- Yunus, A. (2017). Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Maleo Law Journal*, 1(1), 106-118.